

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara umumnya akan menjadi tenaga pendorong berbagai potensi-potensi industri yang terdapat di dalam negara tersebut. Perkembangan sebuah industri dapat dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas serta penyerapan tenaga kerja yang signifikan sehingga pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat secara nasional. Seiring dengan perkembangan industri, target pencapaian perusahaan akan terus meningkat. Dimana ruang lingkupnya akan menjadi semakin besar dan kompleks. Maka akan timbul semakin banyak tantangan bagi setiap pimpinan dan manajemen perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga dapat bersaing dan tetap tumbuh secara kompetitif.

Menyikapi kondisi perkembangan perusahaan yang semakin besar, manajemen perlu melakukan peningkatan pengawasan pada berbagai aspek kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Konsekuensi logis untuk menanggulangi kondisi diatas, perusahaan perlu untuk memiliki sistem pengawasan yang dapat diandalkan yang nantinya diharapkan dapat membantu tugas manajemen dalam meningkatkan kinerja dan mewujudkan tujuan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, pelaksanaan pengawasan kepada berbagai aspek dan kegiatan

perusahaan dapat dilakukan secara langsung oleh anggota perusahaan dan dapat pula melalui sebuah sistem yaitu Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*). Pengendalian internal dapat diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya di dalam perusahaan, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku¹. Jadi dengan kata lain, pengendalian internal bertujuan untuk mengamankan aset perusahaan, menjamin keandalan akuntabilitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan hukum yang berlaku.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) memberikan suatu pandangan terhadap konsep pengendalian internal yang lebih luas dan terintegrasi serta sesuai dengan perkembangan dunia usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam buku *Internal Control Integrated Framework* dijabarkan 5 komponen pengendalian internal yaitu *Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Monitoring and Information & Communication*². Namun sistem pengendalian internal yang dapat diandalkan tidak terlepas dari kinerja internal audit perusahaan. Internal audit perusahaan harus mampu memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan perusahaan dan manajemen sehingga terciptanya suatu pengendalian internal yang dapat diandalkan sehingga tujuan perusahaan dapat diwujudkan.

¹ Messier/Glover/Prawitt, *Jasa Audit&Assurance*, Edisi 4, Hal.250

² COSO, *Control Internal-Integrated Framework*, 2012

PT. PLN (Persero) adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang penyedia jasa pelayanan dan pendistribusian tenaga listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia. PT. PLN (Persero) memiliki bagian internal audit yang disebut Satuan Pengawas Internal (SPI). Fungsi SPI adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan membuat suatu sistem pengendalian internal yang andal serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan. SPI PT. PLN (Persero) membuat sebuah sistem pengendalian internal yang dikenal sebagai *Internal Control Over Financial Report (ICOFR)*. Pengendalian internal yang diterapkan di PT. PLN (Persero) berpedoman kepada *ICOFR* karena di dalam *ICOFR* dijelaskan berbagai prosedur dalam pengendalian internal terhadap berbagai aspek dan kegiatan perusahaan. Seluruh personel perusahaan harus menghargai dan menaati prosedur-prosedur yang telah diatur *ICOFR*.

ICOFR mengatur pengendalian internal terhadap berbagai aset, salah satunya adalah aktiva PDP. Hal tersebut karena nilai dari Aktiva PDP ini cukup besar. Berdasarkan laporan posisi keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang tahun 2014 tercatat nilai aktiva PDP senilai Rp. 565.345.481.529,-.³ Aktiva PDP adalah aset PLN yang masih dalam proses pengerjaan⁴. Jadi aktiva PDP akan timbul ketika proses pembangunan aset PT. PLN (Persero). Aktiva PDP akan dikapitalisasi menjadi aset tetap apabila sudah selesai proses pengerjaannya⁵. Karena masih dalam proses pengerjaan, aktiva PDP perlu untuk diawasi karena berdasarkan pengalaman banyak terjadi penyimpangan. Pengawasan yang

³ Laporan Posisi Keuangan PT. PLN (Persero) 31 Desember 2014

⁴ Kebijakan Akuntansi PT. PLN (Persero), Edisi 2014, hal 29

⁵ Kebijakan Akuntansi PT. PLN (Persero), Edisi 2014, hal 31

dilakukan terhadap aktiva PDP adalah pada komponen pengendalian internal *control activities*. Setiap proses mulai dari awal pengerjaan hingga selesai dan kemudian dikapitalisasi menjadi aktiva tetap dilakukan pengawasan pada bagian *control activities*. Oleh sebab betapa pentingnya pengawasan internal terhadap Aktiva PDP maka penulis tertarik untuk menyusun Karya Ilmiah yang berjudul “Analisis Pengendalian Internal terhadap Aset Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) di PT. PLN (Persero)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan karena perumusan masalah merupakan langkah yang penting dalam sebuah penelitian, maka rumusan masalah yang menjadi dasar dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Apa saja kendala yang terjadi dalam penyelesaian proyek aset PT. PLN (Persero) ?
2. Bagaimana aktivitas pengendalian terhadap aset pekerjaan dalam pelaksanaan (PDP) di PT. PLN (Persero) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian proyek aktiva PT. PLN (Persero)
2. Untuk memahami aktivitas pengendalian terhadap aktiva pekerjaan dalam pelaksanaan (PDP) di PT. PLN (Persero)

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan penulis, yaitu mendapatkan gambaran nyata mengenai aktivitas pengendalian terhadap aktiva PDP di PT. PLN (Persero)
2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi para pembaca dan referensi untuk penelitian selanjutnya